



REVITALISASI ALUN-ALUN UTARA

Kegiatan Parkir Pariwisata Akan Mulai Dibatasi

YOGYAKARTA—Kegiatan parkir bus pariwisata di Alun-alun Utara Yogyakarta akan dibatasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY dalam menata kawasan tersebut.

Selain parkir, usaha penataan juga dilakukan untuk kegiatan perdagangan dan arus keluar masuk halaman depan Keraton Yogyakarta ini. Dari rencana yang disusun Pemkot Yogyakarta, ditargetkan tahun ini pembatasan aktivitas parkir sudah bisa mulai diterapkan.

"Saya kira enam bulan lagi pengurangan atau pembatasan, belum sampai pelarangan, sudah mulai diberlakukan. Pelan-pelan sambil menunggu proses penyiapan sarana penunjangnya," ungkap Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti usai menggelar pertemuan rencana revitalisasi Malioboro dan Alun-alun Utara bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Kepala Dinas PUP ESDM DIY Rani Sjamsinarsi kemarin.

Aktivitas parkir nantinya dialihkan ke lokasi parkir Ngabean, Senopati, dan Abu Bakar Ali. Dengan kebijakan ini, lanjut dia, harus disiapkan armada *shuttle* untuk memfasilitasi wisatawan dari lokasi parkir ke Alun-alun Utara sebelum masuk ke Keraton Yogyakarta.

Infrastruktur *shuttle* masih memerlukan pencermatan lagi. Selain dari sisi fisik armadanya, juga sistem manajemen pengelolaan yang dilakukan.

"Saya kira enam bulan lagi pengurangan atau pembatasan sudah diberlakukan."

HARYADI SUYUTI
Wali Kota Yogyakarta

Sedangkan penataan pedagang akan berlangsung dengan penataan sistem arus mobilitas menuju dan dari Alun-alun Utara. Upaya penataan memerlukan rekayasa fisik, khususnya untuk penyediaan lokasi pedagang. "Nanti orang masuk dari utara dan keluar dari selatan, ini butuh rekayasa fisik," ungkapnya.

Kepala Dinas PUP ESDM DIY Rani Sjamsinarsi menambahkan penataan kawasan Alun-alun Utara merupakan bagian dari upaya revitalisasi kawasan *heritage* sebagai tindak lanjut Undang-Undang No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Dengan begitu, apa yang diagendakan oleh Pemkot Yogyakarta perlu disinergikan dengan rencana kebijakan milik Pemda DIY.

Alun-alun Utara tercatat sebagai salah satu cagar budaya yang saat ini perlu penataan untuk mengembalikan keberadaannya sebagai *heritage*. "Ini bagian dari upaya menjaga, menguatkan, dan mengembalikan nilai dari *heritage* kita dan fungsi tata ruang DIY," kata Rani.

Selama ini usaha penataan Alun-alun Utara hanya dilakukan Pemkot Yogyakarta tanpa mengajak Pemda DIY. Dari beberapa kali upaya yang dilakukan hasilnya tidak pernah optimal.

Selain berharap ada hasil optimal, lanjut dia, langkah bersama Pemda DIY juga menjadi bagian dari pelaksanaan amanat UU Keistimewaan. Melalui kerja sama tersebut, upaya penataan dapat dilakukan dengan mempergunakan dana keistimewaan yang merupakan kompensasi dari pemerintah pusat atas diundangkannya UU Keistimewaan.

● maha deva

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 09 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005